

Received: May 2026

Accepted: May 2026

Published: September 2026

Geneologi Intelektual Reformasi Iran 1979

Restu, Muhammad Miftah Gunawan, Novita Dwi Nur Hidayati

Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto, Universitas Islam
Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto, Universitas Islam Negeri Profesor Kiai
Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto

Email: restudarma87@gmail.com, muhammadmiftahgunawan@gmail.com,
dwi296423@gmail.com

Abstract

This study describes the dynamics of the revolution led by Ayatollah Khomeini against the Shah Pahlavi regime and its impact on the community's socio-religious life. It examines the intellectual genealogy of the 1979 Iranian Revolution. This study discusses the transformation of the monarchical political system into an Islamic Republic triggered by the failure of development policies that are not in line with local traditional values. The research method used in this study is historical research with a qualitative-descriptive nature. Secondary data is systematically collected from various authentic literature to reconstruct past events. The analysis is conducted using a historical sociology approach to explore the causal relationship among modernization, religion, and social change. The results of the study show that the Iranian Revolution was triggered by the White Revolution policy, which tended to be top-down and westernization, thus creating economic disparities and socio-religious tensions. Intellectually, the integration of the concept of Wilayat al-Faqih by Ayatollah Khomeini and the thoughts of Ali Shari'ati succeeded in transforming the Shia tradition into an effective political ideology in mobilizing the masses. Post-revolution, Iran underwent a complete restructuring, encompassing an Islamic-based education system, a strengthening of theocratic-democratic identity, and the implementation of a strategy of economic resistance in the face of international sanctions. Despite successfully achieving national independence, the current regime faces challenges of dual identity among the younger generation and complex macroeconomic pressures.

Keywords: Intellectual Genealogy, Iranian Revolution 1979, Wilayat al-Faqih

Abstrak

Penelitian ini mendeskripsikan bagaimana dinamika revolusi yang dipimpin oleh Ayatullah Khomenei terhadap Rezim Shah Pahlevi serta dampaknya terhadap kehidupan sosial-keagamaan masyarakat, serta menelaah genealogis intelektual yang melatarbelakangi Revolusi Iran 1979.

Penelitian ini membahas mengenai transformasi sistem politik monarki menjadi Republik Islam dipicu oleh kegagalan kebijakan pembangunan yang tidak selaras dengan nilai tradisi lokal. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ialah penelitian sejarah (*historical research*) yang bersifat kualitatif-deskriptif. Data sekunder dikumpulkan secara sistematis dari berbagai literatur otentik untuk merekonstruksi peristiwa masa lalu. Analisis dilakukan melalui pendekatan sosiologi sejarah untuk mengeksplorasi hubungan sebab-akibat antara modernisasi, agama, dan perubahan sosial. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Revolusi Iran dipicu oleh kebijakan *White Revolution* yang cenderung bersifat *top-down* dan westernisasi, sehingga menciptakan kesenjangan ekonomi serta ketegangan sosio-religius. Secara intelektual, integrasi konsep *Wilayat al-Faqih* oleh Ayatullah Khomeini dan pemikiran Ali Syari'ati berhasil mentransformasikan tradisi Syiah menjadi ideologi politik yang efektif dalam memobilisasi massa. Pasca-revolusi, Iran mengalami restrukturisasi total yang mencakup sistem pendidikan berbasis Islam, penguatan identitas teokrasi-demokratis, hingga penerapan strategi ekonomi resistensi dalam menghadapi sanksi internasional. Meskipun berhasil mewujudkan kemandirian nasional, rezim saat ini menghadapi tantangan dualisme identitas pada generasi muda dan tekanan ekonomi makro yang kompleks.

Kata Kunci: Genealogi Intelektual, Revolusi Iran 1979, Wilayat al-Faqih

Pendahuluan

Revolusi Iran 1979 merupakan salah satu peristiwa penting dalam sejarah Islam modern yang menandai berakhirnya kekuasaan monarki Shah Mohammad Reza Pahlavi serta berdirinya Republik Islam Iran. Peristiwa ini tidak hanya mencerminkan perubahan dalam sistem politik, tetapi juga menunjukkan adanya transformasi mendalam dalam aspek sosial, budaya dan keagamaan masyarakat Iran. Revolusi tersebut memperlihatkan bahwa agama, khususnya Islam Syiah, memiliki peran yang kuat dalam memengaruhi dinamika perubahan sosial di era modern (Fauziah et al., 2026).

Latar belakang revolusi berkaitan erat dengan kebijakan modernisasi yang diterapkan pada masa Shah Pahlavi melalui program *White Revolution*. Kebijakan ini bertujuan mendorong kemajuan ekonomi dan sosial, namun dalam praktiknya lebih condong pada westernisasi dan tidak merata di berbagai lapisan masyarakat. Akibatnya, muncul kesenjangan sosial-ekonomi serta ketegangan antara nilai-nilai Barat dan tradisi keagamaan yang telah lama berkembang di Iran (Pradani et al., 2026). Selain itu, karakter pemerintah yang otoriter dan pembatasan terhadap peran agama dalam ruang publik turut memperkuat ketidakpuasan masyarakat. Dalam situasi tersebut, ulama Syiah tampil sebagai kekuatan sosial yang memiliki pengaruh besar dalam membentuk kesadaran kolektif

masyarakat dan merespons perubahan yang terjadi (Ichsan & Hidayatullah, 2023). Dalam kajian ini, fenomena tersebut dipahami melalui pendekatan "geneologi intelektual", yaitu proses terbentuknya kesadaran masyarakat melalui akumulasi nilai, ide, dan pemikiran yang berkembang secara bertahap sebagai respons terhadap perubahan sosial. Sejumlah penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa Revolusi Iran dipengaruhi oleh faktor ketimpangan sosial, modernisasi yang tidak seimbang, serta peran ulama dalam mobilisasi masyarakat (Pradani et al., 2026). Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dinamika modernisasi pada masa Shah Pahlavi, dampaknya terhadap kehidupan sosial dan keagamaan masyarakat Iran, serta geologi intelektual dalam melatarbelakangi Revolusi Iran 1979. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan kajian sejarah Islam modern, khususnya dalam memahami hubungan antara modernisasi, agama dan perubahan sosial.

Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam kajian ini adalah *historical research* atau penelitian Sejarah. Penelitian historis merupakan metode penelitian yang berfokus pada pengumpulan serta menelaah data secara sistematis yang berkaitan dengan peristiwa masa lampau. Tujuannya adalah

untuk mengkaji hubungan sebab—akibat, pengaruh, serta perkembangan suatu peristiwa, sehingga dapat memberikan pemahaman terhadap kondisi saat ini sekaligus menjadi dasar dalam memperkirakan kemungkinan yang akan terjadi di masa depan. Pendekatan ini digunakan untuk merekonstruksi atau menggambarkan kembali peristiwa masa lalu sebagai bahan pembelajaran bagi masyarakat masa kini. Penelitian Sejarah termasuk dalam kategori penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif, dengan penekanan pada proses analisis. Dalam penelitian kualitatif, makna serta sudut pandang subjek menjadi fokus utama. Data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data sekunder yang diperoleh dari berbagai sumber tertulis, seperti buku dan dokumen yang berkaitan dengan kajian sejarah. Proses analisis dilakukan dengan menelaah berbagai sumber tersebut secara mendalam hingga menghasilkan suatu narasi yang disusun berdasarkan beragam perspektif historis.

Hasil dan Pembahasan

Awal Mula Terjadinya Revolusi Islam Iran

Pada penghujung dekade pada tahun 1970-an, Iran digambarkan oleh para pengamat internasional sebagai salah satu negara terkuat dan paling stabil di kawasan Timur Tengah, pendapatan dari sektor minyak yang terus mengalir deras telah

menjalankan roda ekonomi yang mengesankan. Di bawah kepemimpinan Pahlavi Iran memiliki kekuatan militer terkuat di seluruh Timur Tengah. Dalam suasana perang dingin yang tengah memanaskan antara dua blok besar posisi Iran yang berbatasan langsung dengan Uni Soviet yang menjadikannya benteng penting bagi kepentingan Washington untuk membendung pengaruh komunis. Menurut Amerika Serikat kestabilan Iran bukan hanya persoalan regional tetapi merupakan bagian dari strategi geopolitik global (Pradani et al., 2026). Mengkaji eksistensi perkembangan sejarah di Iran terkhusus tertuju pada periode pasca-Revolusi 1979, mengingat pada era tersebut telah menorehkan perjalanan panjang sejak 2700 SM. Menurut Zayar gejala awal revolusi ditandai dengan pembentukan dewan-dewan rakyat di wilayah Utara yang bertugas mengelola urusan sehari-hari, lalu diikuti pemberontakan angkatan udara melalui Sliuras-e-Home Farain, serta munculnya organisasi buruh yang giat bertahan di tengah tekanan, meskipun demikian, tanpa adanya partai Revolusioner kelas pekerja murni yang akhirnya kalah oleh kampanye intimidasi negara baru, Invasi Kurdistan, dan restorasi manajemen dari atas yang menindas kekuatan buruh secara brutal dengan adanya dukungan solid partai Tudeh al-Musawi al-khomeini yang pada akhirnya memperkuat dinamika tersebut (Rais, 2018).

Revolusi Iran memperlihatkan pada dunia bahwa Islam, yang khususnya Islam Syiah dengan semua kekayaan teologis dan tradisi intelektualnya, mampu berfungsi sebagai ideologi politik yang koheren dan efektif dalam menggerakkan perubahan struktural yang radikal. Akar teologis pemberontakan ini bersumber dari sebuah narasi Karbala, yakni tragedi syahidnya Imam Husein dalam melawan kedzaliman, di mana hal tersebut para ulama mentransformasikan secara aktual menjadi simbol perlawanan cerdas terhadap rezim Shah Muhammad Reza Pahlavi, sehingga partisipasi rakyat tidak hanya sebagai tindakan politik semata, melainkan sebagai keharusan moral yang memiliki dimensi sakral kalkulasi pragmatis (Fauziah et al., 2026). Melihat dari mana sudut kondisi pada sektor ekonomi masyarakat Iran di bawah kepemimpinan Pahlavi banyak menyimpan ketimpangan yang mendalam. Sebuah program *land reform* digalakkan pada awal 1960-an hingga 1970-an untuk menyalurkan kepemilikan lahan kepada para petani, akan tetapi kenyataannya sebagian besar petani tetap tidak memiliki lahan yang memadai pada awal reformasi dijalankan. Ketergantungan rezim pada pendapatan minyak memperburuk ekonomi Iran, sebab ketika harga minyak melonjak pasca perang Arab-Israel 1973, Pahlavi justru menggunkan hal tersebut untuk biaya pembelian senjata dan proyek ambisius

seperti reaktor nuklir, tanpa membangun fondasi ekonomi berkelanjutan. Maka hal ini menyebabkan bergejolaknya hati masyarakat untuk melakukan revolusi atas kepemimpinan Pahlavi (Hadab et al., 2022).

Menurut Theda Skocpol dalam paparan analisisnya pada tahun 1982 menilai bahwa revolusi Iran selaras dengan teori revolusi sosialnya, di mana masa secara luas tidak hanya mengganti institusi pemerintahannya saja, akan tetapi justru merombak total hubungan sosial-budaya serta sosial-ekonomi dasar Iran. Meskipun demikian, terdapat penyimpangan unik berupa rekayasa sadar oleh ulama' khususnya Ayatullah Khomeini yang menyatukan berbagai lapisan masyarakat perkotaan di bawah ideologi Syiah. Kehancuran monarki Pahlavi bukan semata akibat niat revolusioner namun disebabkan oleh tidak mampunya negara mempertahankan status quo. Tekanan internasional memperburuk krisis dalam sistem dunia yang kompetitif, ketergantungan Iran pada Amerika Serikat, termasuk kudeta CIA 1953 terhadap Mossadegh serta pelatihan SAVAK oleh Mossad CIA, mengesahkan citra Pahlavi sebagai proksi imperialisme. Citra tersebut menimbulkan sentimen anti barat yang kuat. Sumber daya terambil penuh tanpa adanya distribusi yang adil serta ketegangan geopolitik pasca perang Arab-Israel dan Revolusi Hijau global yang menjadikan beban bertambah. Ini adalah ketidak

selarasan agenda modernisasi barat dengan realitas sosio kultural religius konvensional Iran (Amin, 2025).

Dinamika perjalanan perubahan kekuasaan di Iran merupakan sebuah dialektika yang komprehensif, di mana Revolusi 1979 tidak sekedar hadir sebagai peristiwa politik lokal, melainkan sebuah penyimpangan sosiologis yang mengguncang tatanan global sebagaimana yang disejajarkan oleh Amien Rais dengan Revolusi Rusia dan Cina. Transformasi ini seringkali terjebak dalam dikotomi naratif antara keberhasilan teokratis di bawah kepemimpinan karismatik Ayatullah Khomeini dan kritik tajam ilmuwan sosial yang melihat bahwa fenomena ini adalah revolusi yang memakan anak kandung sendiri, sehingga diperlukan perspektif yang lebih komprehensif dalam melihat keterlibatan aktor intelektual. Sejarah mencatat bahwa fondasi ideologis tidaklah tunggal melainkan sintesa antara pemahaman politik intelektual, di mana Ali Syari'ati sebagai jembatan epistemologi yang sering terabaikan dalam kasus arus utama. Melalui pemikiran Syari'ati, aspirasi rakyat Iran dikonstruksi melampaui ambisi restoratif kepemimpinan Pahlavi yang berorientasi pada kejayaan kuno sekaligus menjadi antitesis terhadap ketergantungan absolut pada kekuatan Barat (Ichsan & Hidayatullah, 2023).

Perjalanan Iran pada abad 20 didorong oleh kekuasaan Dinasti Pahlavi yang berusaha melakukan perubahan sosial secara radikal melalui apa yang diketahui sebagai Revolusi Putih di bawah kepemimpinan Pahlavi, Iran dipaksa untuk mengenakan jubah modernisasi ala barat yang bersifat top-down dan sekuler. Meskipun kebijakan ini membawa kemajuan pada segi fisik dan infrastruktur, ia secara jelas gagal menyentuh masyarakat Iran yang sangat erat spiritual agamisnya (Anam et al., 2022). Kemenangan rakyat Iran pada tahun 1979 menjadi tanda lahirnya sebuah sistem politik yang unik di dunia modern, yakni Republik Islam Iran. Sistem ini berupaya melakukan sintesis antara unsur demokrasi republika yaitu melalui pemilihan presiden dan parlemen dengan prinsip teokrasi syiah melalui institusi pemimpin tertinggi. Konsep ini didasarkan pada keyakinan bahwa hukum tuhan harus menjadi landasan utama bagi tatanan sosial untuk menjamin keadilan yang hakiki (Afifah et al., 2022).

Kondisi Pra-Revolusi Iran di Bawah Rezim Pahlavi

Revolusi Iran menjadi salah satu peristiwa revolusioner paling berpengaruh di Timur tengah, tidak hanya mengubah struktur politik dalam negeri, namun juga mempengaruhi dinamika geopolitik dunia secara luas. Peristiwa ini tidak terpisahkan dari kondisi sosial, ekonomi, dan politik Iran

pada era pemerintahan Mohammad Reza Pahlavi. Dalam tingkat domestik, Pahlavi membuat gerakan westernisasi sebagai upaya dari program modernisasi negara yang berlandaskan nilai-nilai barat. Orientasi pro-Barat ini sudah sejak awal kekuasaannya, termasuk dalam upacara penobatannya yang meniru tradisi monarki Britania Raya dan Belanda. Dalam konteks ini Pahlavi mendeklarasikan bahwa Dinasti Pahlavi merupakan elemen tak terpisahkan dari institusi monarki dunia. Pada tahun 1970-an, kesenjangan sosial—ekonomi di Iran semakin terlihat jelas. Kelas atas menikmati manfaat modernisasi, sementara kelas bawah seperti pedagang, urban menengah, dan ulama' merasa dirugikan dalam bidang sosial ekonominya. Karena hal inilah menyebabkan ketidak puasaan bagi masyarakat yang akhirnya menjadi pemicu awal untuk berevolusi. Ketidakstabilan sosial, politik, dan ekonomi di era Reza Pahlavi hanya memperburuk keadaan. Ketimpangan, otoritarianisme, serta ketergantungan pada AS menyulut perlawanan publik, yang akhirnya meledak menjadi protes masal pada tahun 1979 (Armando et al., 2026).

Revolusi Iran merupakan revolusi yang berbeda pada revolusi-revolusi modern yang biasanya digerakkan oleh ideologi sekuler seperti nasionalisme, sosialisme, atau liberalisme, Revolusi Iran membuktikan bahwa agama bisa menjadi kekuatan politik

afektif untuk menumbangkan rezim yang berkuasa. Dalam konteks ini, Islam Syiah di Iran tidak hanya berfungsi sebagai sistem kepercayaan spiritual, melainkan juga sebagai kerangka ideologis yang memberikan validitas politik, simbol perlawanan tirani serta sarana mobilisasi massa secara luas. Dampak dari revolusi ini menyebar luas ke berbagai aspek kehidupan masyarakat Iran, mulai dari politik, ekonomi, sosial, hingga hubungan internasional. Secara politik, revolusi ini mengganti sistem monarki absolut dengan Republik Islam Iran di bawah kepemimpinan Ayatulloh Khomeini. Dengan konsep *wilayat al-Faqih* (pemerintahan ulama), kekuasaan tertinggi dipegang oleh pemimpin agama, yang menjadi landasan utama sistem teokrasi modern Iran. Pada konsep ini menempatkan legitimasi agama sebagai dasar pemerintahan, menggantikan sistem sekuler yang sebelumnya didukung Barat dan dijalankan oleh Dinasti Pahlavi (Ulama et al., 2026).

Sebelum Revolusi, struktur tatanan ekonomi Iran berada di bawah kendali rezim Mohammad Pahlavi yang menerapkan sebuah model pembangunan kapitalistik yang bergantung pada penghasilan minyak dan dukungan negara-negara barat. Kebijakan ekonomi inilah yang mendorong kuat dan cepat perekonomian Iran pada dekade 1960-1970-an, namun pertumbuhan tersebut tidak dibarengi dengan pemerataan

kesejahteraan. Akibat dari ketidakmerataan tersebut adanya ketimpangan sosial bagi negara Iran (Heryanto, n.d.).

Kepemimpinan yang otoriter pada pemerintahan Mohammad Pahlavi membatasi ruang gerak komunisme untuk mendorong transformasi sosial-ekonomi. Namun, runtuhnya rezim Pahlavi dan penduduk wilayah utara Iran oleh Rusia membuka peluang besar bagi partai Tudeh untuk berkembang. Sebenarnya sejak tahun 1960-an kelompok nasionalis liberal membuat organisasi pertentangan kepada Mohammad Pahlavi, namun banyak menghadapi kesulitan. Pada masa ini Islam Syi'ah mendatangkan sebuah dasar-dasar pembaharuan untuk pemberontakan atas kekuasaan monarki, gerakan tersebut sebagai upaya sintesis bagi pemimpin-pemimpin yang liberal (Sodikin, 2022). Iran mayoritas penduduknya menganut agama Islam, dan menjadikan budaya kolonialisme begitu kuat pada masa pemerintahan Mohammad Pahlavi. Seringkali adanya pergesekan antara rakyat dengan pemerintahan Iran. Hal tersebut membuat Iran sering di *mention* dalam setiap pertemuan yang membahas tentang perlindungan hak asasi manusia pada kaum perempuan. Keberadaan konstitusi Iran pada tahun 1979 memberikan sebuah batasan terhadap aktivitas perempuan Iran, di mana hal ini terjadi semasa kepemimpinan Rezim Pahlavi yang meniru liberalisme barat. Transisi

hukum yang berjalan memicu perempuan di Iran mengadakan demonstrasi dikarenakan ulah dari pemerintah yang tidak sesuai dengan hukum yang diterapkan, sehingga dalam konteks ini membuat ketrebatan dalam berekspresi pada bidang pendidikan, politik, seni, hingga di khalayak umum (Relations, 2023).

Revolusi Iran tahun 1979 dapat merombak pemerintahan yang moderat serta sekuler menjadi negara yang Islamis. Sebelum adanya revolusi 1979 negara Iran merupakan negara yang moderat dan sekuler. Namun demikian, keakraban masyarakat dengan para tokoh agama yang mempunyai nilai tinggi dan baik luamyan lama, sehingga menjadikan kemudahan transformasi akan kesadaran dalam beragama. Sehabis Imam Khomeini berhasil melengserkan kekuasaan Mohammad Pahlavi dari kedudukannya sebagai syah Iran (Saputra et al., 2025). Terjadinya Revolusi Iran juga berdampak pada sistem pendidikan. Iran adalah sebuah negara dengan republik Islam, di mana setelah adanya revolusi, sistem pendidikan mengadopsi prinsip kuat tentang ajaran Islam. Dengan berpedoman kuat terhadap Al-Qur'an dan syari'at Islam. Dari penjelasan tersebut, telah jelas bahwa Iran merupakan Negara yang meraskan adanya persebaran Islam yang menjadi landasan utama dalam sistem tatanan negara. Dengan adanya pedoman tersebut merupakan upaya menumbuhkan kegigihan

untuk berkomitmen bagi para pemuda terhadap pembelajaran. Sehabis terjadinya Revolusi tahun 1979, sistem pendidikan Iran merasakan perubahan yang sangat mendasar, di mana prioritas harus diletakkan pada terjaminnya upaya dalam membesarkan anak-anak generasi muda oleh karena itu menjadi seorang muslim yang mempunyai pegangan kuat terhadap agamanya (Sunan & Yogyakarta, 2022).

Tidak hanya berhenti pada sistem pendidikan saja, setelah Revolusi Islam Iran tahun 1979 telah menumbuhkan semangat dan entitas kaum syiah. Dalam hal ini juga memengaruhi hubungan internasional di kawasan Timur Tengah. Akibat pasca Revolusi tersebut berdampak terhadap hubungan Iran dengan beberapa negara yang dipimpin oleh kelompok sunni. Pasca Revolusi, hubungan Mesir dan Iran hancur total. Politik dari kedua negara tersebut juga bertolak belakang. Di mana Iran anti dengan Amerika, sedangkan Mesir cukup menjalin hubungan baik dengan Amerika. Pada perang Teluk yang terjadi pada tahun 1980-1988 tidak terlepas dari sentimen sunni-syiah. Negara sunni takut dengan ekspansi syiah Imam Khomeini, yang berada di barisan Saddam Husein. Sedangkan Iran didukung oleh negara-negara syiah, seperti suriah, gerakan Hamas, dan beberapa gerakan perlawanan di negara-negara lain (Hamid et al., 2021).

Kepemimpinan Iran Masa Khamenei

Kepemimpinan Islam ditangan Syah Reza Pahlevi terinspirasi oleh Mustafa Kemal yang menjadikan negara Nation—Steet. Dengan menjadikan negara menjadi Nation—steet, negara menjadi bersifat sekuler dan otokratik (F. Hidayat, 2015b). Untuk menjalankan pemerintahan ini, Pahlevi juga mengundang investor AS secara besar-besaran untuk memenuhi ambisinya yang mengakibatkan tekanan imperialisme barat di Iran. Hal tersebut menciptakan kesenjangan sosial yang begitu signifikan di Iran. Hal tersebut memicu kemarahan publik terutama golongan kiri dan Islam Syiah. Pada tahun 1970 Islam Syiah menjadi sarana paling aktif yang berakar kuat dikalangan masyarakat serta memobilisasinya. Pemerintahan Shah Pahlevi semakin menajadi pada Oktober 1977 dimana putra Khomeini, Najaf Mustofa ditemukan meninggal sebab pembunuhan oleh pihak Savak hingga akhirnya memicu demonstrasi yang melibatkan sekitar 4000 mahasiswa di Qum pada Januari 1978. Puncaknya pada 1 Desember 1978, ketika ratusan ribu orang turun ke jalan untuk memperingati terbunuhnya Imam Husein di Padang Karbala, pemerintah Iran memblokir jalan dan menembaki demonstran yang menyebabkan sekitar 4000 jiwa dari berbagai lapisan dan latar belakang. Adanya peristiwa ini memicu persatuan Islam Syiah, golongan

kiri, dan lainnya untuk menentang rezim Syah Pahlevi hingga akhirnya Shah Pahlevi kehilangan kendali atas Iran dan mengasingkan diri ke Mesir. Dan pada masa itu Khomeini menjadi pemimpin Iran dan membentuk Dewan revolusi. Dengan begitu runtuhlah dinasti Iran dan menjadi Negara Teokratis—demokratis (Abdalla et al., 2024).

Revolusi yang dilakukan oleh Ayatollah Khomeini membuktikan bahwa revolusioner tidak hanya bisa dilakukan oleh golongan kiri tetapi juga golongan agama. Hal ini menjadi tonggak awal komunitas berbasis nilai Islam bertumbuh di Iran. Dalam kepemimpinannya, Khomeini mengutamakan kemajuan ilmu pengetahuan melalui lembaga pendidikan hingga akhirnya Iran menjadi negara yang mandiri dan terbebas dari pengaruh non-muslim. UNESCO mencatat bahwa Iran merupakan salah satu negara dengan pertumbuhan tercepat dalam ilmu pengetahuan selama abad ini. Dalam bidang politik, Iran menganut sistem yang tak biasa, yakni sistem *wilayat al faqih* dimana ulama menjadi pemimpin suatu bangsa sekaligus berperan sebagai pengawas dan pembimbing dalam sistem pemerintahan. Sementara untuk eksekutif dipegang oleh seorang presiden.

Peran Khamenei Dalam Pendidikan di Iran

Dalam kepemimpinannya, khomeini menekankan sistem pendidikan harus terintegrasi nilai-nilai islam. Sebab dalam hal ini pendidikan Islam tidak hanya sebatas institusi pendidikan, melainkan sebagai dimensi pembagunan ideologis yang kuat (F. H. Hidayat, 2025). di Iran tersebar dengan pesat melalui generasi muda yang telah dibimbing dan diberi pemahaman oleh para ulama untuk selanjutnya mengakses segala macam bentuk kajian al-Quran. Dalam perkembangannya dalam aspek pendidikan iran menghendaki kewajiban pendidikan dan pengajaran. Bahkan iran memberikan pendidikan kepada warga negaranya pendidikan secara Cuma-cuma dari tingkat dasar hingga tingkat menengah pertama. Kurikulum yang ada di iran menganut sistem sentralistik, dimana kurikulum diatur oleh pemerintah pusat serta corak yang ditunjukkan pemerintah iran bermodel penintegrasian disiplin ilmu pengetahuan yang menganut aspek kemanusiaan (*humanistik*), *Soft Scinces*, dan ilmu pengetahuan mengenai alam (*hard Science*). Dalam melaksanakan pembelajaran, iran menggunakan metode hafalan dimana metode ini merupakan metode yang telah ada secara turun temurun sehingga pemerintah menetapkan sebagai salah satu sumber pendidikan yang sah (F. Hidayat & Rohman, n.d.). Umumnya pembelajaran di iran dilakukan di masjid, namun seiring berjalannya waktu pembelajaran tersebut

pengalamu pergeseran untuk dilakukan di madrasah (Sari & Prastowo, 2022).

Pemerintahan khomeini menunjukkan komitmen yang kuat terhadap pendidikan islam melalui *Roadmap* yang menjadi pilar utama pembentukan identitas nasional berbasis ideologi syiah. Bahkan Dewan Tinggi Revolusi Budaya, yang dibentuk pasca revolusi memainkan peran kunci bahwa kurikulum di setiap jenjang pendidikan mencerminkan prinsip *Syi'ah Jafari*. Dalam rangka memperluas jaringan Islam, pemerintah berkolaborasi dengan sekolah agama diseluruh negri, khususnya di wilayah Qom yang menjadi pusat pelatihan ulama dan cendekiawan muslim dengan fokus teologi syi'ah, hukum syariat, dan filsafat islam (Zulkifli et al., 2025).

Kepemimpinana khamenei dalam bidang politik

Ayatullah Ruhulah Komenei meruntuhkan monarki pahlevi yang pecah pada 1979 yang mengguncang dunia internasional. Revolusi Iran tersebut mampu membebaskan rakyat Iran dari belenggu Amerika yang memegang kendali pada masa kepemimpinan Shah Pahlevi, akan tetapi revolusi ini menimbulkan berbagai macam resiko dan dampak yang cukup besar bagi masyarakat iran (Burhanudien et al., 2026). Maka dari itu, Imam khomeini menempatkan *mullah* (agamawan) sebagai pemegang otoritas tertinggi dibidang politik

dan agama dan hal ini merujuk pada *Velayat al-Faqih*. Velayat secara bahasa dimaknai sebagai *Province, Governorship*, jabatan gubernur, perwalian. Jika ditinjau secara makna, *Velayat* merupakan bagian dari implementasi *akidah imamah* yang secara harfiah dipandang sebagai teman atau menjadi lebih dekat dengan seseorang. Alasan mengapa ulama fiqh yang memegang otoritas pemerintahan ialah karena mereka yang akan menetapkan hukum agar sejalan dengan syariat islam. Konsep *Velayat al-Faqih* didasarkan pada prinsip imamah yang menjadi salah satu rukun dalam madzhab *syiah imamah*. Penerapan ini bertujuan untuk "*mengisi kekosongan politik*" selama belum adanya Imam Mahdi. Maka dari itu pemilihan seorang imam harus memenuhi delapan syarat yang meliputi; *Pertama*, berpengetahuan luas akan keislaman. *Kedua*, adil. *Ketiga*, dapat dipercaya dan berbudi luhur. *Keempat*, jenius. *Kelima*, memiliki kemampuan administratif. *Keenam*, bebas dari pengaruh asing. *Ketujuh*, mampu mempertahankan hak hak bangsa. *Kedelapan*, hidup sederhana. Dampak dari *Velayat al-Faqih* Memberikan kekuasaan yang berkesuaian dengan ideologi yang mengusungnya bahwa segala urusan pemerintahan dibawah tanggung jawab para *mullah* (F. Hidayat, 2015a). Walaupun dengan konsep *Velayat al-Faqih*, Iran pasca revolusi menghadapi masa perpaduan antara konsepsi modern dengan *Imamiyah*, hingga

akhirnya Iran membentuk lembaga eksekutif, legislatif, dan sebagainya. Lembaga tersebut meliputi presiden, kabinet, departemen, dewan perwakilan rakyat yang dipilih melalui pemilihan umum, tetapi atas lembaga yang didalamnya terdapat ilmuan agama. Dengan hal tersebut iran melahirkan konfigurasi yang khas antara negara dan institusi islam.

Dalam perjalanannya setahun setelah revolusi iran, iran dibawah kepemimpinan Khomeini langsung terlibat konflik dengan negara tetangganya Irak. Ditandai dengan terjadinya krisis Teluk pertama pada 1980 dimana Irak menginvasi Iran dengan perang saling membalas hingga tahun 1988. Setelah perang teluk selesai Iran mendapatkan berita berkabung yakni dengan meninggalnya Ayatollah khomeini yang kemudian digantikan oleh Ayatollah Ali Khomeini. Di bawah kepemimpinan Ayatollah Ali Khomeini dilakukan reformasi kehidupan sosial dari yang anti barat menjadi kehidupan masyarakat muslim. Dan hingga kini Iran mengkonsepsikan bahwa semua urusan agama harus berpegang pada Imam (Burhanudien et al., 2026).

Kondisi sosial Iran Pasca Revolusi **Dalam bidang sosial**

Revolusi Iran pada tahun 1979 bukan sekadar peristiwa penggulingan sistem pemerintahan monarki absolut yang dipimpin Mohammad Reza Shah Pahlavi untuk kemudian menjadi negara dengan

sistem Republik Islam yang berada dibawah kepemimpinan Ayatollah Khomeini. Namun, Peristiwa ini merupakan sebuah revolusi total dimana mampu merubah tatanan suatu negara secara menyeluruh mulai dari struktur kelas, norma budaya, dan kontrak sosial yang telah mengakar dalam waktu yang cukup lama di tanah Persia. Ditinjau dari segi historis, revolusi ini dapat dikategorikan unik karena dalam revolusi tersebut menggabungkan beberapa elemen, mulai dari elemen modernitas seperti mobilisasi massa perkotaan dan penggunaan media dengan narasi kepemimpinan teokratis yang tradisional. Sebagai langkah awal untuk mengonsolidasikan kekuasaan, Ayatollah Khamenei melakukan restrukturisasi kelas secara radikal dengan menghapus pengaruh elit sekuler yang berafiliasi dengan Barat (Westoxification atau Gharbzadegi) dan menggantinya dengan kelas menengah baru yang religius melalui mobilisasi kaum *mostazafin* (kaum tertindas). Negara mengambil alih aset-aset strategis melalui yayasan keagamaan (*bonyad*) untuk mendistribusikan kekayaan, namun dalam perjalanannya, kebijakan ini justru melahirkan birokrasi elit baru yang memicu ketimpangan ekonomi sistemik antara kelompok yang dekat dengan pusat kekuasaan dan masyarakat umum. (Abrahamian, E.2021).

Ketimpangan struktural dan redistribusi aset tersebut secara langsung

berkelindan dengan dinamika gender yang sangat kompleks, di mana posisi perempuan di Iran menjadi arena pertempuran ideologis yang paling sengit pasca-revolusi. Di satu sisi, pemberlakuan hukum syariah yang ketat dan kewajiban berhijab tampak membatasi ruang gerak perempuan dalam koridor hukum formal. Namun, secara paradoks, revolusi ini juga membawa dampak tak terduga: terciptanya iklim "keamanan moral" di ruang publik yang akhirnya meyakinkan keluarga-keluarga tradisional di pedesaan untuk mengizinkan anak perempuan mereka menempuh pendidikan tinggi tanpa rasa takut akan kontaminasi budaya Barat(F. Hidayat et al., n.d.). Akibatnya, dalam empat dekade terakhir, Iran mengalami ledakan jumlah mahasiswi yang mendominasi ruang-ruang kelas universitas, melampaui jumlah laki-laki di banyak bidang sains dan humaniora. Fenomena ini melahirkan generasi perempuan terdidik dengan kesadaran kritis kolektif yang tinggi, yang pada gilirannya menjadi motor penggerak utama dalam berbagai gerakan sosial kontemporer yang menuntut kesetaraan hukum dan martabat, sebagaimana terlihat dalam gelombang protes yang meluas belakangan ini. (Sadeghi, F. 2022).

Kesadaran kritis yang tumbuh pesat di kalangan perempuan dan intelektual ini sebenarnya merupakan hasil sampingan dari kegagalan proyek "*Islamisasi Pendidikan*" yang direncanakan oleh negara sejak awal tahun

1980-an (Mauizah & Hidayat, 2024). Melalui "Revolusi Kebudayaan", pemerintah berusaha membersihkan kurikulum dari pengaruh liberalisme dan sekularisme guna mencetak warga negara yang taat pada prinsip *Velayat-e Faqih*. Namun, upaya indoktrinasi ini menghadapi tantangan seiring dengan terjadinya revolusi digital dan penetrasi internet yang masif di Iran. Terbentuklah sebuah dualisme identitas yang tajam di mana masyarakat menunjukkan kepatuhan formal di ruang publik demi keamanan, sementara di ruang privat, mereka menjalani gaya hidup yang sangat liberal dan terkoneksi secara global (Vakil, S. 2023).

Divergensi identitas antara negara dan kaum muda ini semakin diperparah oleh tekanan ekonomi makro yang kronis, yang sebagian besar dipicu oleh sanksi internasional yang berkepanjangan dan manajemen sumber daya yang tidak efisien. Sejak tahun 2020, kelas menengah Iran yang dulunya merupakan pilar stabilitas sosial, mulai mengalami proses "*proletarisasi*" di mana daya beli mereka merosot tajam akibat inflasi yang mencapai angka dua digit. Urbanisasi besar-besaran yang terjadi sejak dekade 1980-an kini mencapai titik jenuh, di mana kota-kota besar seperti Teheran, Mashhad, dan Isfahan gagal menyediakan lapangan kerja yang memadai bagi jutaan lulusan universitas yang baru lahir dari sistem pendidikan revolusi.

Ketidakmampuan negara dalam menjamin mobilitas sosial vertikal bagi warganya telah mengubah frustrasi ekonomi yang mendalam menjadi kemarahan politik yang eksplosif. Masyarakat kini cenderung melihat kesulitan ekonomi mereka bukan lagi sebagai ujian agama, melainkan sebagai kegagalan tata kelola politik, yang memicu kerentanan terhadap stabilitas sosial nasional secara keseluruhan. (Salehi-Isfahani, D. 2024).

Menghadapi tekanan ekonomi yang kian menghimpit, masyarakat Iran juga mengalami pergeseran dalam praktik keagamaan dan pola relasi sosial di tingkat akar rumput. Meskipun Iran tetap menjadi pusat teokrasi Syiah di dunia, sosiologi agama menunjukkan adanya fenomena "sekularisasi dari bawah" yang semakin nyata di mana ritual keagamaan menjadi lebih bersifat personal daripada politis. Banyak warga kota mulai menarik diri dari partisipasi dalam lembaga-lembaga keagamaan yang berafiliasi dengan negara dan mencari bentuk spiritualitas yang lebih independen. Pergeseran ini mencerminkan kelelahan sosial terhadap politisasi agama yang dianggap telah gagal memberikan solusi konkret bagi permasalahan sehari-hari seperti korupsi dan ketidakadilan. Dalam konteks ini, identitas nasional Iran sering kali kembali berpijak pada warisan sejarah Persia pra-Islam sebagai bentuk *resistensi simbolis* terhadap narasi resmi pemerintah

yang hanya menekankan identitas Islam murni. (Ansari, A. M. 2025).

Selain dinamika internal, kondisi sosial Iran pasca-revolusi juga dipengaruhi oleh permasalahan geopolitik yang memaksa masyarakat untuk mengembangkan ketahanan (*resilience*) yang luar biasa namun juga penuh tekanan. Sanksi ekonomi yang bertujuan melemahkan pemerintah justru sering kali menghantam struktur sosial paling bawah, memicu krisis kesehatan mental dan meningkatnya angka migrasi kaum intelektual (*brain drain*) ke luar negeri. Anak-anak muda berbakat Iran kini lebih banyak melihat masa depan mereka di Eropa atau Amerika Utara daripada di tanah air sendiri, yang pada jangka panjang akan mengancam keberlanjutan pembangunan nasional. Namun, di tengah tekanan tersebut, muncul pula gerakan masyarakat sipil yang mandiri, mulai dari komunitas seni bawah tanah hingga gerakan advokasi lingkungan yang mencoba mengisi ruang-ruang kosong yang ditinggalkan oleh negara. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat Iran tetap dinamis dan memiliki agensi yang kuat dalam menentukan arah perubahan sosial mereka sendiri di luar kontrol ketat aparat keamanan (Maljoo, M. 2025).

Kondisi Ekonomi Iran Pasca Revolusi 1979

Sebelum adanya revolusi, ekonomi Iran sangat bergantung pada modal asing Barat, hal tersebut menciptakan pertumbuhan semu namun meninggalkan kesenjangan sosial yang begitu signifikan. Pasca-revolusi, dibawah pemerintahan Ayatullah Khomeini yang mengusung jargon kemandirian dan keadilan sosial bagi kaum *mustaz'afin* (golongan tertindas). Hal ini diwujudkan melalui kebijakan nasionalisasi besar-besaran terhadap aset-aset perbankan, perusahaan asuransi, dan industri manufaktur utama yang sebelumnya dimiliki oleh keluarga kerajaan atau investor asing. Transformasi ini bertujuan untuk memutus rantai ketergantungan pada sistem kapitalisme global, meskipun di sisi lain memicu pelarian modal (*capital flight*) dan eksodus tenaga ahli ke luar negeri yang melemahkan fondasi produktivitas nasional di tahun-tahun awal pemerintahan baru. (Abbas, 2024). Dinamika ekonomi Iran tidak dapat dilepaskan dari warisan destruktif Perang Iran-Irak yang terjadi tak lama setelah revolusi. Kerusakan infrastruktur migas yang masif pada periode tersebut menciptakan luka struktural yang memerlukan waktu puluhan tahun untuk pulih. Dalam tinjauan akademis terbaru, para ahli menyoroti bahwa pola belanja militer yang terbentuk sejak era perang tersebut terus mendominasi postur anggaran Iran hingga tahun 2024. Hal ini sering kali mengorbankan alokasi untuk inovasi

teknologi sipil dan infrastruktur publik yang vital. Akibatnya, Iran terjebak dalam siklus rekonstruksi yang tidak pernah benar-benar selesai karena gangguan eksternal yang terus-menerus menekan ruang fiskal negara (Fathurrahman, A. 2024). Salah satu elemen paling kontroversial namun krusial dalam ekonomi Iran adalah peran *Bonyad* atau yayasan keagamaan. Organisasi-organisasi ini telah berevolusi menjadi konglomerat multisektoral yang menguasai hampir sepertiga ekonomi nasional. Analisis pada tahun 2023 menunjukkan bahwa keberadaan *Bonyad* menciptakan ekosistem ekonomi paralel yang sering kali kebal terhadap audit publik dan regulasi pajak standar. Meskipun yayasan ini berperan sebagai penyangga sosial melalui program filantropi bagi masyarakat miskin, mereka juga menjadi penghambat utama bagi masuknya investasi swasta karena dominasi pasar yang tidak seimbang dan akses eksklusif terhadap devisa negara yang disubsidi. (Hifdzi, 2024).

Doktrin "Ekonomi Resistensi" yang dicanangkan oleh Pemimpin Agung Ali Khamenei menjadi jangkar kebijakan luar negeri dan domestik Iran dalam menghadapi tekanan Barat. Doktrin ini menekankan pada swasembada pangan, pengembangan industri pertahanan domestik, dan peningkatan hubungan dagang dengan blok Timur seperti BRICS dan SCO. Hingga proyeksi tahun 2026, Iran terus menggenjot produksi domestik di sektor manufaktur dan

energi terbarukan sebagai upaya lepas dari ketergantungan ekspor minyak mentah. Meskipun ada keberhasilan dalam industri petrokimia, korupsi struktural dan inefisiensi dalam manajemen perusahaan milik negara tetap menjadi "penyakit dalam" yang menggerogoti potensi pertumbuhan ekonomi yang lebih sehat (Pahlevi, 2021). Secara makroekonomi, ketergantungan pada pendapatan minyak masih menjadi *tumit Achilles* bagi Teheran. Meskipun volume ekspor minyak ke pasar Asia tetap terjaga melalui mekanisme "pasar gelap" dan diskon harga, volatilitas harga minyak dunia secara langsung mempengaruhi stabilitas anggaran nasional. Pada periode 2021-2024, Iran mencoba melakukan diversifikasi pendapatan melalui pajak dan ekspor jasa teknis, namun hasilnya belum mampu menutupi defisit anggaran yang besar. Kondisi ini memaksa pemerintah untuk terus melakukan intervensi moneter yang berisiko meningkatkan jumlah uang beredar, yang pada gilirannya memperburuk ekspektasi inflasi di masyarakat. Di sisi lain, perkembangan sektor teknologi dan *startup* di Iran memberikan secercah harapan bagi diversifikasi ekonomi. Meskipun berada di bawah sanksi, generasi muda Iran berhasil membangun ekosistem digital domestik yang kuat, mulai dari platform e-commerce hingga layanan transportasi online yang mirip dengan model global. Namun, hambatan dalam mengakses pasar modal

internasional dan batasan transfer teknologi tetap menjadi plafon bagi ekspansi perusahaan-perusahaan ini ke tingkat regional. Tanpa adanya pelanggaran sanksi atau reformasi birokrasi yang radikal, potensi sumber daya manusia Iran yang unggul ini akan terus terhambat oleh realitas isolasi ekonomi yang kian dalam. (Umar, M. 2025).

Kesimpulan

Revolusi Iran pada tahun 1979 merupakan perubahan yang terjadi secara radikal sehingga menjatuhkan sistem monarki absolut yang dipimpin oleh Shah Mohammad Reza Pahlavi dan mendirikan Republik Islam Iran melalui sistem negara yang menanut nilai teokrasi dan demokrasi. Hal tersebut dipicu oleh kegagalan program modernisasi *White Revolution* (*revolusi putih*) yang bersifat kebarat-baratan (*westernisasi*), kesenjangan sosial-ekonomi yang tajam akibat ketergantungan pada minyak, serta karakter pemerintahan yang otoriter dan pro-imperialisme Amerika Serikat. Secara intelektual, gerakan yang dipimpin oleh Ayatullah Khomeini melalui konsep *Wilayat al-Faqih* (pemerintahan ulama) dan pemikiran Ali Syari'ati yang mentransformasikan tradisi Syiah menjadi ideologi politik efektif untuk memobilisasi massa. Pasca-revolusi, Iran mengalami perubahan yang secara komprehensif mulai dari sistem pendidikan yang berlandaskan

Al-Qur'an hingga restrukturisasi kelas sosial, meskipun kini harus menghadapi tantangan berupa sanksi internasional, inflasi, serta dualisme identitas pada generasi muda yang semakin terkoneksi secara global.

Referensi

- Abdalla, A. U. A., Said, G., & Rubaidi. (2024). MANUEVER IRAN DALAM KONTESASI GEOPOLITIK DI TIMUR TENGAH PASCA REVOLUSI ISLAM. *CARITA: IJurnal ISejarah Idan IBudaya ISSN*., 3(1), 26–33.
<https://doi.org/10.35905/carita.v3i1.10927>
- Afifah, N., Lestari, J. T., & Annarawati, R. (2022). Pemikiran / Pembaharuan Islam Iran : Ali Syariati. *Tabyin: Jurnal Pendidikan Islam*, 04(1), 56–73.
- Amin, I. (2025). Revolusi Islam Iran : Komparasi antara Revolusi Sosial dan Revolusi Agama. *Jurnal I C M E S*, 9(1), 77–90.
- Anam, M. C., Umam, F., & Aminullah. (2022). PERAN PEREMPUAN DI IRAN PASCA REVOLUSI 1979 DALAM PERSPEKTIF SHIRIN EBADI THE ROLE OF WOMEN IN IRAN POST 1979 REVOLUTION IN SHIRIN EBADI'S PERSPECTIVE *Mob*. 02(01), 35–48.

- Armando, A., Putra, C., Putra, A. S., & Wiratmoko, D. (2026). *Transformasi Hubungan Diplomatik Teheran – Washington Pascarevolusi Islam Iran 1979*. 5(1), 12397–12405.
- Burhanudien, Firmansyah, A., Arifin, Z., Khoarizmi, H. S. Al, Ramadan, Y. F., Fangestu, R., Lubis, A. F., & Shoheh, M. (2026). SEJARAH, REVOLUSI BERDIRINYA ISLAM IRAN TAHUN 1979 SERTA PERAN ULAMA SYIAH DALAM POLITIK ISLAM IRAN. *Jurnal Transformasi Pendidikan Modern*, 7(1), 197–218.
- Fauziah, N., Wahyuni, S., Maulana, H., Yahya, R., & Maulana, A. (2026). REVOLUSI IRAN 1979 DAN BERDIRINYA REPUBLIK ISLAM IRAN: PERAN ULAMA SYIAH DALAM TRANSFORMASI POLITIK, SOSIAL, DAN BUDAYA. *Jurnal Transformasi Pendidikan Modern*, 7(1), 163–179.
- Hadab, S. Al, Santalia, I., & Wahyuddin, G. (2022). *SEJARAH ISLAM MODERN DI IRAN DAN IDE PEMBAHRUAN AYATULLAH KHOEMENI*. 11(1).
- Hamid, I., Setiadi, O., Mataram, U. I. N., & Kudus, I. (2021). *Arab Saudi dan Iran: Kontestasi Ideologi dan Dampaknya di Kawasan Timur Tengah Pasca The Arab Spring Pendahuluan*. 4(1), 129–140.
- Heryanto, A. (n.d.). *Kiblat dan beban ideologis ilmu sosial indonesia*. 1983.
- Hidayat, F. (2015a). Pengembangan Paradigma Integrasi Ilmu : Harmonisasi Islam dan Sains dalam Pendidikan. *Jurnal Pendidikan Islam*, IV(2), 301–316. <https://doi.org/10.14421/jpi.2015.42.299-318>
- Hidayat, F. (2015b). Pengembangan Paradigma Integrasi Ilmu: Harmonisasi Islam dan Sains dalam Pendidikan. *Jurnal Pendidikan Islam*, 4(2), 299. <https://doi.org/10.14421/jpi.2015.42.299-318>
- Hidayat, F. H. (2025). TRIKOTOMI FILSAFAT PENDIDIKAN ISLAM DI TENGAH DINAMIKA LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM KONTEMPORER. *TAJIDID: Jurnal Pemikiran Keislaman dan Kemanusiaan*, 9(1), 1–15. <https://doi.org/10.52266/tajid.v9i1.4131>
- Hidayat, F., Khairuddin, H. B., Yahya, S., & Pratiwi, R. (n.d.). *Diseminasi Filsafat Pendidikan Islam Berdasarkan Pengalaman Praktis di Indonesia pada Forum Internasional di KIDU Malaysia*.
- Hidayat, F., & Rohman, M. (n.d.).

MODERNISASI PENDIDIKAN ISLAM DI MINANGKABAU: STUDI TENTANG INTERAKSI DENGAN PAN-ISLAMISME (1909-1945).

Ichsan, S. M., & Hidayatullah, S. (2023). Revolusi Republik Islam Iran: Studi atas Bentuk Pembaharuan Ayatollah Sayyid Ruhullah Musavi Khomeini. *EKHSIS: Jurnal Ekonomi, Syariah Dan Studi Islam*, 1(1).
<https://doi.org/https://doi.org/10.59548/je.v1i1.17>

Mauizah, A. Z., & Hidayat, F. (2024). KONTROVERSI PEMIKIRAN IGNAZ GOLDZIER DAN IMPLIKASINYA PADA TREN STUDI ISLAM ABAD 19-21 M. *FiTUA: Jurnal Studi Islam*, 5(1), 78–93.
<https://doi.org/10.47625/fitua.v5i1.564>

Pradani, Y., Dwijulianto, A., Shohih, M., & Aramahwada. (2026). *SEJARAH REVOLUSI ISLAM IRAN 1979: AWAL MULA REVOLUSI HINGGA DAMPAK REVOLUSI ISLAM IRAN Yuliana*. 7(1), 305–329.

Rais, M. (2018). Sejarah Perkembangan Islam di Iran. *TASAMUH: JURNAL STUDI ISLAM*, 10(2), 273–288.

Relations, I. (2023). *No Title*. 9, 1–19.

Saputra, R., Eva, Y., Islam, U., Imam, N., Padang, B., Khusus, P., Kunci, K., & Agama, P. (2025). *PENGARUH REVOLUSI TERHADAP SISTEM HUKUM DI IRAN*. 12(1), 265–276.

Sari, S. A., & Prastowo, A. (2022). Pendidikan Islam Di Iran Pasca Revolusi. *Akademika: Jurnal Keagamaan Dan Pendidikan*, 18(2), 163–173.

Sodikin, A. (2022). *Perkembangan modernisme di iran abad xix - xx*. 2, 464–474.

Sunan, U. I. N., & Yogyakarta, K. (2022). *Pendidikan Islam Di Iran Pasca Revolusi*. 18(2), 163–173.

Ulama, P., Dalam, S., & Politik, T. (2026). *Jurnal Transformasi Pendidikan Modern Jurnal Transformasi Pendidikan Modern*. 7(1), 163–179.

Zulkifli, Rosyada, D., Zalnur, M., & Delvia, M. (2025). Pendidikan islam di iran: gambaran umum, struktur sistem, dan kebijakan pemerintah. *El-Banat: Jurnal Pemikiran Dan Pendidikan Islam*, 15(2), 422–436.
<https://doi.org/https://doi.org/10.54180>